



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2021**

2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dapat kami selesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 dan Dokumen Penetapan 2014.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2021 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Pasaman “Terwujudnya Masyarakat Pasaman Yang Lebih Baik Dan Bermartabat”.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pasaman tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak aparat pemerintah daerah baik dalam kegiatan perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Tahun 2021.

Lubuk Sikaping, 10 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasaman



SUKARDI, S. Pd. M. M.

NIP 19700507 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Data Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4
D. Isu Strategis	9
E. Landasan Hukum	14
F. Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
B. Perjanjian Kinerja 2021	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. Capaian Kinerja	29
B. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna dan bertanggung jawab, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan dan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk capaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman selaku unsur pembantu pimpinan terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Tahun 2021 yang dimaksud sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

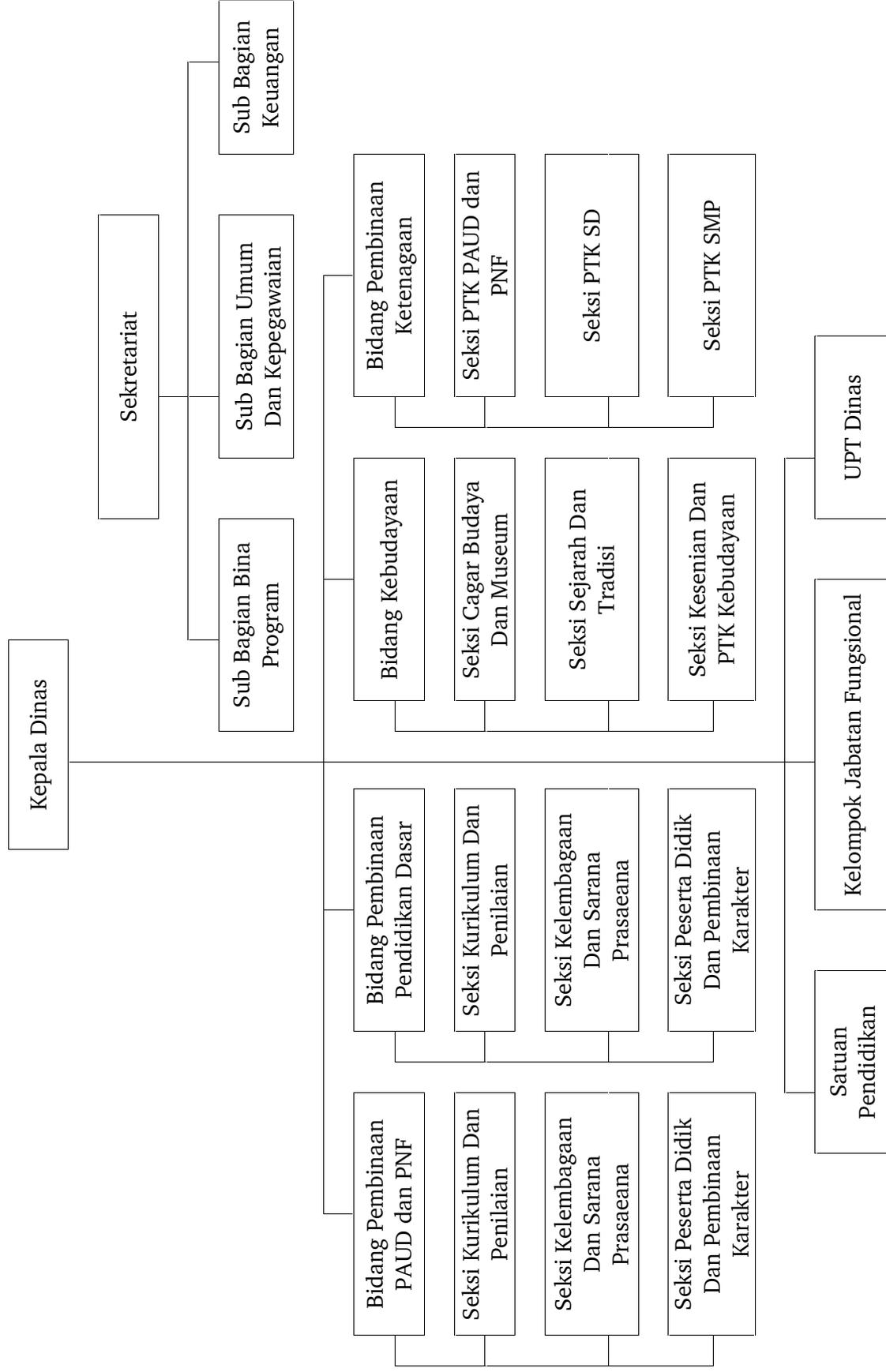
B. Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman memiliki Tugas Pokok dan Fungsi yang telah dirumuskan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman yang ditugaskan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini :

Gambar Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman



C. Data Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman

a. Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Tabel Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Tahun 2021

No	Nama	NIP	Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Pendidikan Pelatihan
1	Drs. Ali Yusri, M. Pd.	19640913 199003 1 006	IV/b	Kepala Dinas	S2 Pendidikan	
2	Gunawan, S. Pd. M. Si.	19681017 199203 1 004	IV/b	Sekretaris	S2	PIM III
3	Drs. Budi Indrawan	19670611 199411 1 001	IV/a	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	S1 Ilmu Pendidikan	
4	Ahdi Susanto, S. Pd. M. Pd.	19811103 200604 1 008	IV/a	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	S2 Pendidikan	
5	Drs. Noviar, M. M.	19661130 199412 1 003	IV/b	Kepala Bidang Kebudayaan	S2	
6	Muslim Munir, S. Pd. M. Pd.	19701005 199303 1 006	IV/a	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	S2 Administrasi Pendidikan	PIM III 2017
7	Endrianto Caniago, SH	19650505 198503 1 007	III/d	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	S1 Ilmu Hukum	
8	Fitria Hartati, A. Md.	19830904 200901 2 002	III/b	Kepala Sub Bagian Keuangan	D3 Akutansi	
9	Marwanto, SH	19740824 200701 1 003	III/c	Kepala Sub Bagian Bina Program	S1 Ilmu Hukum	
10	Dra. Yanisda	19651008 199003 2 005	III/d	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang PAUD dan PNF	S1 Ilmu Pendidikan	ADUM 1997
11	Maifamli Moehamd, ST	19770504 200312 1 002	III/d	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang PAUD dan PNF	S1 Teknik	
12	Kasmarena, SH	19831004 200701 2 005	III/c	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembinaan Karakter Bidang PAUD dan PNF	S1 Ilmu Hukum	
13	Zulkarnain, S. Pd.	19721111 200604 1 011	III/d	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	S1 Ilmu Pendidikan	
14	Haryanto, ST	19770707 200801 1 007	III/d	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	S1 Teknik	

No	Nama	NIP	Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Pendidikan Pelatihan
15	Nur Adillah, SH	19830801 200801 2 005	III/c	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembinaan Karakter Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	S1 Ilmu Hukum	
16	Kasmawita	19660826 200801 2 001	III/d	Kepala Seksi Cagar Budaya dan Museum	S1 Ilmu Pendidikan	
17	Mhd. Ali Hanafiah, S. Pd.	19641212 198903 1 010	IV/a	Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi	S1 Ilmu Pendidikan	
18	Satri Gustiana, SE	19830813 200701 2 002	III/c	Kepala Seksi Kesenian dan PTK Kebudayaan	S1 Ekonomi	
19	Leni Irza, S. Pd.	19650114 198603 2 005	III/d	Kepala Seksi PTK PAUD dan PNF	S1	
20	Faizal Admi, SH	19670207 199012 1 001	III/d	Kepala Seksi SD	S1 Ilmu Hukum	PIM IV 2004
21	Suryadi, SH	19721003 201212 1 002	III/b	Kepala Seksi SMP	S1 Ilmu Hukum	
22	Embinarizal	19620101 198803 1 012	IV/b	Pengawas Mata Pelajaran	S1 Ilmu Pendidikan	
23	Nafrizal, S. Pd.	19621128 198703 1 009	IV/b	Pengawas Mata Pelajaran	S1 Ilmu Pendidikan	
24	Hayatunismah	19630812 198412 2 002	IV/b	Pengawas Mata Pelajaran	S1 Ilmu Pendidikan	
25	Ernizar, S. Pd.	19680721 199212 2 001	IV/b	Pengawas Mata Pelajaran	S1 Ilmu Pendidikan	
26	Rusliandi, S. Pd.	19681104 199203 1 002	IV/a	Pengawas Mata Pelajaran	S1 Ilmu Pendidikan	
27	Ermita, S. Pd.	19660601 198703 2 009	IV/a	Pengawas TK Kabupaten Pasaman	S1 Ilmu Pendidikan	
28	Resnawati	19670202 198802 2 001	IV/b	Pengawas TK Kabupaten Pasaman	S1 Ilmu Pendidikan	
29	Erlina, S. Pd.	19670512 198802 2 001	IV/b	Pengawas TK Kabupaten Pasaman	S1 Ilmu Pendidikan	
30	Aida Harmaini, S. Pd. M. Pd.	19680529 198802 2 001	IV/b	Pengawas TK Kabupaten Pasaman	S2 Administrasi Pendidikan	

No	Nama	NIP	Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Pendidikan Pelatihan
31	Mutia Adrina, S. Pd.	19710122 199303 2 003	IV/b	Pengawas TK Kabupaten Pasaman	S1 Ilmu Pendidikan	
32	Dahnirman Hadi, S. Pd. SD.	19650427 198802 1 001	IV/a	Fungsional Umum	S1	
33	Masri, S. Pd.	19650530 198708 1 001	IV/a	Fungsional Umum	S1	
34	Refki Mukhliza, SH. MH.	19721209 200701 1 005	III/d	Fungsional Umum	S2	
35	Yandi Fardian Nasution, ST	19780209 200901 1 004	III/d	Fungsional Umum	S1 Teknik	
36	Sartini, S. Pd. I.	19840625 200901 2 004	III/c	Fungsional Umum	S1	
37	Yusfinar	19670312 198603 2 001	III/b	Fungsional Umum	SMEA	
38	Yusna	19670622 198911 2 001	III/b	Fungsional Umum	SMA	
39	Epilis, SH	19671128 198602 2 001	III/b	Fungsional Umum	S1 Ilmu Hukum	
40	Akmal	19680404 198703 1 003	III/b	Fungsional Umum	SMA	
41	Syafni, SH	19700806 200701 2 009	III/b	Fungsional Umum	S1 Ilmu Hukum	
42	Isna Hayani, SH	19790308 200901 2 003	III/b	Fungsional Umum	S1 Ilmu Hukum	
43	Desi Prima Wati, SE	19801222 201101 2 006	III/b	Fungsional Umum	S1 Ekonomi	
44	Ariyesti, SH	19810414 200701 2 005	III/b	Fungsional Umum	S1 Ilmu Hukum	
45	Raida Mardeni, SH	19810825 200701 2 006	III/b	Fungsional Umum	S1 Ilmu Hukum	
46	Jefrianto, SH	19820825 200901 1 009	III/b	Fungsional Umum	S1 Ilmu Hukum	
47	Yulisman, SE	19830502 200801 1 001	III/a	Fungsional Umum	S1 Ekonomi	
48	Alberd, A. Md.	19840909 201101 1 012	III/a	Fungsional Umum	D3 Komputer	
49	Elia Nora, SH	19840923 201406 2 004	III/a	Fungsional Umum	S1 Ilmu Hukum	
50	Musrayanti	19780106 201406 2 002	III/a	Fungsional Umum	S1	
51	Almailis	19700529 200701 2 002	II/d	Fungsional Umum	SMA	
52	Afrizal	19770912 200701 1 006	II/d	Fungsional Umum	MAN	
53	Hasri	19800328 200701 1 004	II/d	Fungsional Umum	SMK	

No	Nama	NIP	Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Pendidikan Pelatihan
54	Agus Eldi	19680825 200701 1 005	II/c	Fungsional Umum	Paket C	
55	Deny Yoshendri	19700318 200801 1 010	II/c	Fungsional Umum	SMA	
56	Mukhnadi	19650105 201001 1 001	II/b	Sopir	Paket C	
57	Riski Kurnia Nst, A. Md.	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
58	Riko Fitrianti, S. Sos.	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
59	Afdal, S. Pd.	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
60	Dimi Hanifa, SE	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
61	Febriola, SH	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
62	Yonika	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
63	Defitriani Ahda, S. Pd.	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
64	Hasemi Rafsanjani	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
65	Monalisa, SE	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
66	Syafriadi	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
67	Ryan Saputra, SH	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
68	Pebrina Susanti, SE	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
69	Rini Gautama Nauli Hasibuan, A. Md.	---	---	Tenaga Administrasi	D3	
70	Asdi Marta, SH	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
71	Ratno Agus, SE	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
72	Febrizal	---	---	Tenaga Administrasi	SMA	
73	Nana Mulya Juita	---	---	Tenaga Administrasi	SMA	
74	Yusmiarni, SH. MH	---	---	Tenaga Administrasi	S2	
75	Alfebri Syamra, SE	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
76	Hendrik Saputra, S. Pd.	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
77	Yuniarti Hs, S. Pd. SD.	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
78	Welly Susanti	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
79	Winda Hartika, S. Pd.	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
80	Hutria Anwar	---	---	Tenaga Administrasi	SMA	
81	Asril	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
82	Erik Septian, S. Kom.	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
83	Septa Fiandi, SE	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
84	Gusri Pramuna Putra, S. Pd.	---	---	Tenaga Administrasi	S1	

No	Nama	NIP	Gol. Ruang	Jabatan	Pendidikan	Pendidikan Pelatihan
85	Ferdi Maizar	---	---	Tenaga Administrasi	D3	
86	Rahmat Fikri, S. Kom.	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
87	Tiska Tri Sukma, A. Md.	---	---	Tenaga Administrasi	D3	
88	Yudha Irfan	---	---	Tenaga Administrasi	SMA	
89	Eka Ariani, SE	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
90	Ummi Kalsum	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
91	Riskon Habibi, S. Pd.	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
92	Sutri Yanti, S. Pd.	---	---	Tenaga Administrasi	S1	
93	Em Fharied	---	---	Sopir	S1	
94	Joni Hendra	---	---	Sopir	SMA	
95	Novari Aliamsyah	---	---	Sopir	SMA	
96	Sayful	---	---	Sopir	SMA	
97	Gelvid Sarma	---	---	Sopir	SMA	
98	Abdul Aziz	---	---	Sopir	SMA	

b. Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman menaungi Sekolah dan Pendidikan Non Formal lainnya. Rincian satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut :

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terdiri dari : 12 (dua belas) PAUD Negeri dan 312 (tiga ratus dua belas) PAUD Swasta
- (2) Sekolah Dasar (SD) terdiri dari : 244 (dua ratus empat puluh empat) Sekolah Dasar Negeri dan 5 (lima) Sekolah Dasar Swasta
- (3) Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 38 (tiga puluh delapan) SMP Negeri

Komposisi Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil di setiap satuan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Jenis PNS	TK	SD	SMP	Jumlah
1	Pengawas Sekolah	5	23	5	33
2	Kepala Sekolah	4	227	33	264
3	Pendidik (Guru) PNS	74	1.199	447	1.720
4	Pendidik (Guru) P3K	2	47	5	54
5	Tenaga Administrasi	-	53	30	83
Jumlah		85	1.549	520	2.154

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa jumlah tenaga pendidik (guru) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman berjumlah 1.774 orang, Kepala Sekolah 264 orang dan Pengawas Sekolah berjumlah 33 orang. Tenaga administrasi berjumlah 83 orang. Secara total saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara yang berada di setiap satuan pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman berjumlah 2.154 orang.

D. Isu Strategis

Analisis lingkungan internal adalah gambaran potensi-potensi yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman yang mempengaruhi terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang di

dalamnya mencakupi (1) sumber daya aparatur; (2) sarana dan prasarana; dan (3) organisasi kelembagaan. Rincian kekuatan dan kelemahan lingkungan internal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a. Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan untuk melaksanakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Pasaman secara berkesinambungan, efektif, efisien dan bersinerji menuju arah sasaran peningkatan mutu dan pemenuhan standar nasional pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terukur dan terkendali. Hal ini telah dibuktikan dengan diraihnya prestasi kejuaraan baik dalam penguasaan materi akademis maupun non akademis seperti prestasi olahraga, akademis dan prestasi lainnya baik individu maupun kelembagaan di tingkat nasional maupun internasional.
- b. Adanya perbaikan yang terus menerus dari seluruh jajaran pendidikan di Kabupaten Pasaman untuk mendukung dan memantapkan program Pasaman Cerdas guna mendukung Kabupaten Pasaman sebagai kabupaten dengan misi menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang merata dan keadilan, mewujudkan pendidikan yang unggul dan bermutu, meningkatkan sarana dan prasana pendidikan yang berwawasan lingkungan, meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, mengembangkan Pendidikan Karakter menuju *Good Governance* melalui manajemen pendidikan yang akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja.
- c. Tersedianya sumber daya aparatur kependidikan yang cukup besar dan potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan. Hal ini terlihat dari komposisi dan proporsi tingkat pendidikan pegawai yang ada dan siap untuk menjalani tantangan pembangunan pendidikan.

2. Kelemahan

Dalam penyelenggaraan Bidang Pendidikan juga tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi salah satunya adalah pemahaman bagi masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan. Dalam

kehidupan sosial, masih muncul berbagai permasalahan yang dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai akibat belum stabilnya kondisi ekonomi yang mengakibatkan banyaknya anak rawan putus sekolah, faktor budaya yang sangat kental mempengaruhi perilaku anak disamping masih terdapat anak-anak yang masuk usia sekolah tapi enggan untuk bersekolah.

Di sisi lain peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan masih perlu mendapat perhatian yang cukup serius, mengingat daya tampung siswa saat ini masih belum memenuhi akan kenyamanan dan ketenangan dalam proses belajar mengajar. Sementara itu Otonomi Daerah telah merangsang perubahan aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengemban tugasnya secara profesional melalui pelatihan-pelatihan masih perlu ditingkatkan. Pembangunan pendidikan didalamnya mencakup tujuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, guru, metoda pembelajaran dan murid. Permasalahan pendidikan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dalam upaya mencapai IPM 80 adalah :

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan akses dan pemerataan pendidikan adalah :
 - 1) Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah yang ada;
 - 2) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk.
- b. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah:
 - 1) Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru dalam strategi, metode dan evaluasi pembelajaran, belum dapat memfasilitasi siswa dalam meningkatkan kompetensi siswa secara berkelanjutan.
 - 2) Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran.
 - 3) Belum terpenuhinya kesejahteraan minimal guru.
 - 4) Belum baiknya disiplin guru dalam melaksanakan tugas.
 - 5) Media belajar siswa dan media penampilan hasil belajar dan kreativitas siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah
 - 6) Kebijakan dan implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah sebagai media belajar masih rendah.

- 7) Kendali mutu pembelajaran melalui efektivitas kinerja pengawas pembina dan kepala sekolah perlu dikembangkan melalui penetapan kebijakan bersama yang terprogram.
- c. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah :
- 1) Kurangnya perhatian sekolah dalam memwawahi siswa yang berprestasi.
 - 2) Pembelajaran kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi masih bersifat klasikal.
 - 3) Kurangnya pembinaan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun intra kurikuler.
 - 4) Pergeseran nilai-nilai karakter, agama, kebangsaan dan budaya dikalangan peserta didik yang menjadi isu nasional saat ini.
- d. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan efisiensi pendidikan adalah
- 1) Kemampuan manajerial Kepala Sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah.
 - 2) Belum optimumnya kegiatan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG / MGMP), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS / MKPS) dalam kegiatan supervisi kinerja.
 - 3) Mutu pelayanan administratif bidang kurikulum, sarana pendidikan dan bidang pengembangan profesi belum optimum.
 - 4) Kebijakan ke arah pengembangan budaya belajar melalui pengembangan sekolah sebagai organisasi belajar masih lemah.
 - 5) Pengembangan inovasi dalam memenuhi kebutuhan perkembangan siswa terdapat permasalahan seperti :
 - a) Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan hal ini disebabkan karena belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan. Kurang sadar dan tanggapnya aparat terhadap pentingnya kehadiran data bagi perencanaan dan pengawasan. Belum terbangunnya sarana dan mekanisme pendataan yang efisien dan efektif yang berbasis teknologi informasi sebagai sumber data primer. Kurangnya dukungan dana operasional dan alat transportasi untuk pendataan.

- b) Sistem perencanaan yang berkembang dalam bentuk penyusunan rencana strategik dan program tahunan pada tingkat kabupaten maupun tingkat sekolah belum berkembang baik.
- c) Proses pelaksanaan tugas yang berbasis perencanaan masih sangat lemah.
- d) Sekolah kurang dapat berfungsi optimal sebagai wahana belajar yang terencana.
- e) Sistem evaluasi dapat berfungsi sebagai bahan perbaikan belajar mengajar dan manajemen pelaporan untuk pengembangan data pada tingkat sekolah masih sangat lemah.
- f) Permasalahan dalam bidang manajemen pendidikan adalah tidak jelasnya konsep otonomi daerah di bidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, masih tingginya peran dan ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam masalah-masalah teknis penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
- g) Masih rendahnya kinerja manajemen birokrasi pendidikan, kurang tersedianya data pendidikan yang mutakhir dan akuntabel yang bisa dijadikan acuan bagi perencanaan dan pengendalian program pendidikan.
- h) Verifikasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Sekolah belum melibatkan seluruh stake holders sekolah secara transparan serta belum optimumnya dalam pengelolaan administrasi keuangan sekolah, lebih ditingkatkan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan yang dikelola dengan baik, tertib dan dapat dipertanggung jawabkan untuk dana yang berasal dari masyarakat.
- i) Pengelolaan bantuan keuangan terhadap sekolah maupun siswa perlu dipantau dengan baik untuk meningkatkan pemberdayaan dana secara efektif.
- j) Belum optimalnya fungsi komite sekolah dan dewan sekolah untuk meningkatkan mutu pengorganisasian yang lebih efektif.

- k) Standar mutu kinerja personal dan lembaga belum ditetapkan sebagai bagian dari program lembaga yang juga tercermin dalam implementasi kegiatan dan evaluasi.

E. Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman yang ditetapkan untuk jangka 5 (lima) tahun yaitu 2016 sampai dengan tahun 2021 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Nomor : 800/02.A/Disdikbud.Pas/2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021. Penetapan jangka 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman telah melalui tahapan-tahapan yang stimulan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021 dengan melibatkan stake holders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) RPJMD,

Forum SKP, sehingga Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dan stake holders.

Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kabupaten Pasaman dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan, Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pasaman dengan potensi, keragaman dan kompleksitas yang dimiliki, harus mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, agamis dan berbudaya.

Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman adalah : *“Terwujudnya Masyarakat Pasaman Yang Lebih Baik Dan Bermartabat”*.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman tahun 2021 dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Meningkatkan Peran Lembaga Adat
- (2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- (6) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

3. Tujuan, Sasaran dan Kebijakan

Tujuan adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pasaman sebanyak 7 (tujuh) sasaran strategis dari 3 (tiga)

tujuan. Berikut dijelaskan secara rinci Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan serta Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman merujuk dari Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan arah Kebijakan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman

Visi : Terwujudnya Masyarakat Pasaman Yang Lebih Baik Dan Bermartabat			
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta Meningkatkan Peran Lembaga Adat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1.1 Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama	Sasaran 1.1.2 Meningkatnya Peranan Lembaga Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran dan penguatan adat melalui peningkatan kompetensi pemangku adat 2. Meningkatkan peran dan penguatan lembaga adat melalui fasilitasi, koordinasi dan ketersediaan sarana prasarana keagamaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran dan fungsi pemangku, lembaga dan masyarakat adat 2. Peningkatan kompetensi pemangku adat 3. Peningkatan fasilitas dan ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan lembaga adat dan lembaga pendidikan adat yang representatif
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2.1 Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat melalui penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, Pendidikan Non Formal (PNF), Informal, Berkebutuhan khusus dan akademi komunitas 2. Meningkatkan mutu pendidikan melalui fasilitasi kompetensi dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun 2. Peningkatan fasilitas penyelenggaraan pendidikan non formal, informal, berkebutuhan khusus dan akademi komunitas 3. Penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat mengikuti dan melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi 4. Peningkatan angka partisipasi PAUD dan Pendidikan Dasar 5. Fasilitas layanan

		<p>kualifikasi pendidik (guru) dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pembelajaran</p> <p>3. Meningkatkan pemerataan pendidikan melalui ketersediaan sarana prasarana, pemerataan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>4. Meningkatkan layanan pendidikan melalui PAUD, Pendidikan Dasar dan Partisipasi Masyarakat (PKBM)</p> <p>5. Meningkatkan tata kelola pendidikan melalui pengelolaan data pendidikan dan kemitraan</p> <p>6. Meningkatkan karakter dan integritas peserta didik</p> <p>7. Meningkatkan minat baca dan budaya membaca melalui peningkatan kapasitas SDM, jangkauan dan ketersediaan sarana prasarana pendukung</p>	<p>pendidikan tingkat menengah</p> <p>6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan</p> <p>7. Peningkatan ketersediaan data berbasis teknologi informasi</p> <p>8. Peningkatan kemitraan antara pemerintah dengan lembaga / stakeholder Pendidikan</p> <p>9. Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendidikan</p> <p>10. Peningkatan pemerataan</p> <p>11. Peningkatan fasilitas kompetensi dan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan</p> <p>12. Peningkatan kualitas pembelajaran dan penerapan kurikulum pendidikan</p> <p>13. Peningkatan akreditasi sekolah</p> <p>14. Peningkatan dan penguatan mutu pembelajaran yang berorientasi pada pendidikan karakter / budi pekerti yang terintegrasi</p> <p>15. Pengembangan budaya sekolah yang kondusif, berkarakter dan berintegritas</p>
Misi 6 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 6.1	Sasaran 6.1.1	1. Peningkatan	1. Transparansi dan tertib

Meningkatkan tata kelola asset daerah yang baik dan optimalisasi pemanfaatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan	manajemen dan sistem pengawasan aparaturnya daerah 2. Peningkatan transparansi dan indeks pengelolaan keuangan daerah	pengelolaan keuangan daerah 2. Meningkatkan tata kelola asset daerah yang baik dan optimalisasi pemanfaatan 3. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dilakukan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman tahun 2020 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Tahun 2016 – 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2021 dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Tahun 2021. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2
Perjanjian Kinerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pasaman Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase angka putus sekolah SD/MI	%	00,02
		Persentase angka putus sekolah SMP/MTs	%	00,02
		Persentase angka putus sekolah SMA/SMK/MA	%	00,02
		Persentase anka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	96,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Persentase angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	92,00
2	Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD dan DIKMAS	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	59
		Jumlah PAUD	Lembaga	272
		Jumlah LKP	Lembaga	38
		Jumlah PKBM	Lembaga	21
		Rasio guru PAUD PNS terhadap pendidik	Rasio	1:35
3	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar SD/Paket A	%	100
		Angka Partisipasi Murni SD/Paket A	%	98,80
		Angka Partisipasi Kasar SMP/Paket B	%	97,56
		Angka Partisipasi Murni SMP/Paket B	%	90,90
		Persentase ruang kelas SD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	90,64
		Persentase ruang kelas SMP yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	88,56
		Persentase laboratorium IPA SD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	1.532
		Persentase ruang laboratorium IPA SMP yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	69,20
		Persentase perpustakaan SD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	48,40
		Persentase perpustakaan SMP yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	89,00
		Persentase siswa pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintas (KIP)	%	37,00
4	Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PNF	Penduduk yang berusia >15	%	99,09
		Tahun melek huruf (Tidak buta aksara)		
		Meningkatnya peserta didik non formal	Orang	300
		Jumlah sekolah penyelenggara inklusi	Sekolah	12

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
5	Meningkatnya rasio guru PNS terhadap peserta didik serta guru yang layak mengajar	Rasio guru PNS terhadap murid PAUD	Rasio	1:78
		Rasio guru PNS terhadap murid SD/MI	Rasio	1:22
		Rasio guru PNS terhadap murid SMP/MTs	Rasio	1:23
		Rasio guru PNS terhadap murid per kelas rata-rata		
		PAUD	Rasio	1:2.2
		SD/MI	Rasio	1:1.0
		SMP/MTs	Rasio	1:1.2
		Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S.1 / D.IV	%	50,00
		Persentase guru SD yang memiliki kualifikasi S.1 / D.IV	%	87,00
		Persentase guru SMP yang memiliki kualifikasi S.1 / D.IV	%	94,00
		Persentase guru PAUD yang bersertifikasi	%	25,00
		Persentase guru SD yang bersertifikasi	%	72,00
		Persentase guru SMP yang bersertifikasi	%	83,00
		Persentase guru yang memiliki indek kinerja minimal baik	%	87,00
6	Meningkatnya indek integritas peserta didik	Indek integritas dan penumbuhan budi pekerti peserta didik	%	70,00
7	Mmeningkatkan kualitas manajemen layanan pendidikan	Persentase PAUD terakreditasi minimal baik	%	40,00
		Persentase SD terakreditasi minimal baik	%	75,00
		Persentase SMP terakreditasi minimal baik	%	75,00
		Persentase LKP terakreditasi	%	35,00
		Persentase PKBM terakreditasi	%	35,00
		Kemitraan dalam pengelolaan pendidikan	Dokumen	4
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan keragaman budaya	Peningkatan pengembangan nilai budaya daerah	%	74,00
9	Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya	Peningkatan pengelolaan kekayaan budaya daerah	%	30,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
10	Meningkatnya pengelolaan keragaman budaya	Terciptanya pengelolaan budaya melalui penyelenggaraan festival budaya daerah	%	100,00

Dalam rangka pencapaian sasaran di atas maka ditetapkanlah beberapa program yang mendukung ketercapaiannya dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Program Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pasaman Tahun 2021

No	Program	Anggaran
1	Program Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5,865,000.00
2	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 287,141,173,645.00
3	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 211,987,500.00
4	Program Penyediaan Jasa Penunjang Rusan Pemerintah Daerah	Rp. 10,378,300,000.00
5	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp. 175,100,000.00
6	Program Pengelolaan Pendidikan Dasar	Rp. 43,360,062,240.00
7	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah	Rp. 15,899,420,400.00
8	Program Pengelolaan PAUD	Rp. 6,363,775,000.00
9	Program Pengelolaan Pendidikan Non Formal	Rp. 2,796,411,000.00
10	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 39,730,000.00
11	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp. 384,610,500.00
12	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 18,752,150.00
13	Program Pengelolaan Museum	Rp. 617,000,000.00
Jumlah		Rp. 367,392,187,435.00

C. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Dalam rangka pencapaian target Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman tahun 2016 – 2021, setiap tahun anggaran perlu ditetapkan target kinerja sehingga kegiatan organisasi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan mempertimbangkan skala prioritas. Berikut rincian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Tahun 2021 :

Tabel 4
Rencana Kerja Tahunan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya mutu pendidikan	Angka kelulusan (AK) : - SD - SMP Jumlah Lembaga PAUD Negeri	100% 100% 6
2.	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	20
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keragaman budaya daerah	Jumlah prosesi kebudayaan daerah yang diaktualisasikan	8
4.	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB
5.	Meningkatnya capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan	97
4.	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	90

Dalam rangka pencapaian target indikator sasaran strategis ditetapkan beberapa program kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator dimaksud. Beberapa indikator yang dibutuhkan dalam penyusunan program kegiatan yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahun berjalan dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 5
Target Indikator Program (Outcome)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Tahun 2020

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan			
	Persentase angka putus sekolah SD/MI	%	00,02
	Persentase angka putus sekolah SMP/MTs	%	00,02
	Persentase angka putus sekolah SMA/SMK/MA	%	00,02

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target
	Persentase angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	95,00
	Persentase angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	91,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya Angka Partisipasi (APK) PAUD / TK		
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	64
	Jumlah PAUD	Lembaga	280
	Rasio guru PAUD PNS terhadap pendidik	Rasio	1:40
Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Dasar		
	Angka Partisipasi Kasar SD/Paket A	%	100,00
	Angka Partisipasi Murni SD/Paket A	%	98,40
	Angka Partisipasi Kasar SMP/Paket B	%	97,41
	Angka Partisipasi Murni SMP/Paket B	%	89,24
	Persentase ruang kelas SD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	88,82
	Persentase ruang kelas SMP yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	86,41
	Persentase laboratorium IPA SD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	1.176
	Persentase ruang laboratorium IPA SMP yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	65,60
	Persentase perpustakaan SD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	45,20
	Persentase perpustakaan SMP yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	88,00
	Persentase siswa pendidikan dasar penerima bantuan melalui Kartu Indonesia Pintas (KIP)	%	37,00
Program Pendidikan Non Formal			
	Meningkatnya kompetensi peserta didik non formal	orang	250
	Jumlah LKP	Lembaga	40
	Jumlah PKBM	Lembaga	20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya rasio guru PNS terhadap murid dan guru yang layak mengajar		
	Rasio guru PNS terhadap murid PAUD	Rasio	1:80
	Rasio guru PNS terhadap murid SD/MI	Rasio	1:23

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target
	Rasio guru PNS terhadap murid SMP/MTs	Rasio	1:24
	Rasio guru PNS terhadap murid SMA/SMK/MA	Rasio	1:20
	Rasio guru PNS terhadap murid per kelas rata-rata		
	PAUD	Rasio	1:2.6
	SD/MI	Rasio	1:1.0
	SMP/MTs	Rasio	1:1.4
	Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S.1 / D.IV	%	40,00
	Persentase guru SD yang memiliki kualifikasi S.1 / D.IV	%	86,00
	Persentase guru SMP yang memiliki kualifikasi S.1 / D.IV	%	93,00
	Persentase guru PAUD yang bersertifikasi	%	20,00
	Persentase guru SD yang bersertifikasi	%	67,00
	Persentase guru SMP yang bersertifikasi	%	80,00
	Persentase guru yang memiliki indek kinerja minimal baik	%	86,00
Program manajemen Pelayanan Pendidikan	Indek integritas dan penumbuhan budi pekerti peserta didik	%	65,00
	Persentase PAUD terakreditasi minimal baik	%	20,00
	Persentase SD terakreditasi minimal baik	%	80,00
	Persentase SMP terakreditasi minimal baik	%	80,00
	Persentase LKP terakreditasi	%	20,00
	Persentase PKBM terakreditasi	%	20,00
	Kemitraan dalam pengelolaan pendidikan	Dokumen	3
	Peningkatan pengembangan nilai budaya daerah	%	12,00
	Peningkatan pengelolaan kekayaan budaya daerah	%	77,00
	Terciptanya pengelolaan budaya melalui penyelenggaraan festival budaya daerah	Kegiatan	8

Dengan telah ditetapkannya indikator setiap program di atas maka dapat disusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman pada tahun 2021 berupa Rencana Kerja Tahunan dan anggaran dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 6
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Pendidikan		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	4,365,000.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	280,114,170,644.00
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	328,855,600.00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	7,475,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	82,431,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	117,672,120.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	3,600,000.00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	5,000,000.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	133,390,000.00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	72,000,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	10,038,760,000.00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	152,600,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	20,000,000.00
B	Program Pengelolaan Pendidikan		
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100%	9,717,898,792.00
	Pengadaan Mebel Sekolah	100%	499,966,000.00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	100%	33,484,828,149.00
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	100%	68,346,730.00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100%	8,650,000.00
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100%	4,778,472,500.00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	100%	11,587,057,000.00
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi	100%	55,725,250.00

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Anggaran
	Peserta Didik		
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100%	4,637,000.00
8	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100%	381,960,000.00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	100%	5,788,197,750.00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	100%	17,702,500.00
9	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	100%	2,753,700,560.00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	100%	23,656,000.00
C	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		
10	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	30,021,250.00
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	Kebudayaan		
D	Program Pengembangan Kebudayaan		
11	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	100%	360,000,000.00
12	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	100%	18,458,400.00
E	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		
13	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
	Penetapan Cagar Budaya	100%	14,064,350.00
F	Program Pengelolaan Permuseuman		
14	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	100%	186,795,950.00
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	100%	352,903,250.00
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	100%	77,502,500.00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2021, merupakan kewajiban setiap Satuan Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaporkan capaian kinerja serta kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman yang diberi wewenang kebijakan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan dapat menyampaikan capaian kinerja tahun 2021 dalam rangka menunjang capaian kinerja Bupati :

Tabel 7

No	Indikator	Target	Capaian
1	Harapan lama sekolah	12,80	12,90
2	Rata-rata lama sekolah	08,00	08,30
3	Jumlah PAUD Negeri	04,00	03,00
4	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan	14,00	14,00

Tabel 8
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya mutu pendidikan	Angka kelulusan (AK) : - SD - SMP Jumlah PAUD Negeri	100% 100% 4
2.	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	5
3.	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keragaman budaya daerah	Jumlah warisan budaya yang diaktualisasikan	5
4.	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB
5.	Meningkatnya capai kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan	94

6.	Meningkatnya internal organisasi	pengawasan	Berkurangnya pemeriksaan organisasi	temuan terhadap	90
----	----------------------------------	------------	-------------------------------------	-----------------	----

Tabel 9
Capaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya mutu pendidikan	Angka kelulusan (AK) :			
		- SD	100%	100%	100
		- SMP	100%	100%	100
		Jumlah PAUD Negeri	6		
2	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	5	5	100
3	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keragaman budaya daerah	Jumlah warian budaya yang diaktualisasikan	5	5	100
4	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	B	
5	Meningkatnya capai kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan	94	93,35	99,31
6	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	90	90	100

Dalam menunjang pencapaian Target Kinerja dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 10
Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
(Indikator Sasaran Renstra SKPD Tahun 2021)
Urusan Wajib Pendidikan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terselenggaranya pendidikan gratis dasar dan menengah	%	100	100	100
2	Persentase angka putus SD/MI	%	0,02	0,03	150
3	Persentase angka putus SMP/MTs	%	0,002	0	100
4	Persentase angka putus SMA/SMK/MA	%	0,02	0	100
5	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	95,00	92,97	97,86
6	Meningkatnya angka partisipasi (APK) PAUD/TK	%	55,00	87,40	161

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	87	87	100
8	Jumlah PAUD	Lembaga	270	257	95,19
9	Jumlah lembaga PAUD Negeri	Lembaga	4	3	75
10	Jumlah LKP	Lembaga	37	14	37,83
11	Jumlah PKBM	Lembaga	20	15	75
12	Rasio guru PAUD yang PNS terhadap peserta didik	Rasio	1:30	1:80	222,5
13	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar				
14	Angka partisipasi kasar (APK) SD/Paket A	%	100,00	103,30	103
15	Angka partisipasi murni (APM) SD/Paket A	%	98,40	102,7	104,36
16	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/Paket B	%	97,41	88,40	90,75
17	Angka partisipasi murni (APM) SMP/Paket B	%	89,24	100,2	114,52
18	Jumlah ruang kelas SD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	88,82	88,59	97,70
19	Persentase ruang kelas SMP yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	86,41	94,35	109,19
20	Persentase laboratorium IPA SMP yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	65,60	65,00	99,08
21	Persentase perpustakaan SD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	45,20	47,50	104,40
22	Persentase perpustakaan SMP yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	88,00	86,10	97,84
23	Persentase siswa pendidikan dasar penerima bantuan melalui kartu indonesia pintar (KIP)	%	37,00	41,00	110,81
24	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	98,78	98,91	100,03
25	Meningkatnya kompetensi peserta didik non formal	Orang	250	352	140,80
26	Melek aksara penduduk dewasa usia 15 - 59 tahun	%	98,75	0	0
27	Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi	Jumlah	10	12	120
28	Jumlah lembaga akademis komunitas	Lembaga	0	0	0
29	Meningkatnya rasio guru PNS terhadap murid dan guru yang layak mengajar				
30	Rasio guru PNS terhadap murid PAUD	Rasio	1:30	1:80	222,50
31	Rasio guru PNS terhadap murid SD/MI	Rasio	1:23	1:28	121,74
32	Rasio guru PNS terhadap murid SMP/MTs	Rasio	1:21	1:24	114,20
33	Rasio guru PNS terhadap murid per kelas rata-rata				
34	PAUD	Rasio	1:2,6	1:6	230
35	SD/MI	Rasio	1:1	1:1,3	130
36	SMP/MTs	Rasio	1:1,4	1:0,7	50
37	Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S.1 / D.IV	%	40,00	32,30	80,75
38	Persentase guru SD yang memiliki kualifikasi S.1 / D.IV	%	86,00	93,41	108,62
39	Persentase guru SMP yang memiliki kualifikasi S.1 / D.IV	%	93,00	96,90	104,19

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
40	Persentase guru PAUD yang bersertifikasi	%	20,00	32,40	162,00
41	Persentase guru SD yang bersertifikasi	%	67,00	80,10	119,55
42	Persentase guru SMP yang bersertifikasi	%	80,00	79,10	98,88
43	Persentase guru yang memiliki indek kinerja minimal baik	%	86,00	79,70	92,67
44	Indek integritas dan penumbhan budi pekerti peserta didik	%	65,00	73,24	112,67
45	Persentase PAUD yang terakreditasi minimal baik	%	20,00	39,00	75,00
46	Persentase SD yang terakreditasi minimal baik	%	65,00	70,00	116,67
47	Persentase SMP yang terakreditasi minimal baik	%	70,00	73,60	107,14
48	Persentase LKP yang terakreditasi minimal baik	%	20,00	0	0
49	Persentase PKBM yang terakreditasi minimal baik	%	20,00	20,00	100,00
50	Kemitraan dalam pengelolaan pendidikan	Dokumen	3	1	33,33

1. Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020

a. Realisasi capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2021 dan 2020.

Pencapaian kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020, sebagian besar capaian indikator kinerja yang sama mengalami peningkatan.

Tabel 11
Capaian yang mengalami peningkatan diantaranya adalah :

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra (selama 5 tahun)	Kinerja Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021
1	Meningkatnya mutu pendidikan	Angka kelulusan (AK) :			
		- SD	100%	100%	100%
		- SMP	100%	100%	100%
		Jumlah PAUD Negeri	4	9	9
2	Meningkatnya cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	17	14	14
3	Meningkatnya pemahaman	Jumlah warian budaya yang	5	5	5

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target Kinerja Renstra (selama 5 tahun)	Kinerja Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021
	masyarakat tentang keragaman budaya daerah	diaktualisasikan			
4	Meningkatnya akuntabilitas pelayanan organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	B	B
5	Meningkatnya capai kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program / kegiatan	94	95,33	96
6	Meningkatnya pengawasan internal organisasi	Berkurangnya temuan pemeriksaan terhadap organisasi	90	68,25	

Tabel 12
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Pendidikan
Tahun 2018 dan 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021
1	Terselenggaranya pendidikan gratis dasar dan menengah	%		100	100	100
2	Persentase angka putus SD/MI	%		0,03	0,02	0,02
3	Persentase angka putus SMP/MTs	%		0	0	0
4	Persentase angka putus SMA/SMK/MA	%		0	0,10	0
5	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%		95,00	92,97	94,97
6	Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%		87,40	89,40	90,04
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%		161,85	161,90	162,00
8	Jumlah PAUD	Lembaga		257	260	260
9	Jumlah LKP	Lembaga		14	14	14
10	Jumlah PKBM	Lembaga		15	15	15
11	Rasio guru PAUD yang PNS terhadap peserta didik	Rasio		1:30	1:80	1:90
12	Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar					
13	Angka partisipasi kasar (APK) SD/Paket A	%		100,00	103,30	103,30
14	Angka partisipasi murni (APM) SD/Paket A	%		98,40	102,7	105,4

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021
15	Angka partisipasi kasar (APK) SMP/Paket B	%		97,41	88,40	88,40
16	Angka partisipasi murni (APM) SMP/Paket B	%		89,24	100,2	101,3
17	Jumlah ruang kelas SD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%		88,82	88,59	90,45
18	Persentase ruang kelas SMP yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%		86,41	94,35	96,31
19	Persentase laboratorium IPA SMP yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%		65,60	65,00	68,00
20	Persentase perpustakaan SD yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%		45,20	47,50	49,80
21	Persentase perpustakaan SMP yang memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%		88,00	86,10	88,30
22	Persentase siswa pendidikan dasar penerima bantuan melalui kartu indonesia pintar (KIP)	%		37,00	41,00	41,00
23	Penduduk yang berusia >15 tahn melek huruf (tidak buta aksara)	%		98,78	98,81	98,91
24	Meningkatnya kompetensi peserta didik non formal	Orang		250	352	398
25	Melek aksara penduduk dewasa usia 15 - 59 tahun	%		0	0	0
26	Jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi	Jumlah		10	12	12
27	Jumlah lembaga akademis komunitas	Lembaga		0	0	0
28	Meningkatnya rasio guru PNS terhadap murid dan guru yang layak mengajar					
29	Rasio guru PNS terhadap murid PAUD	Rasio		1:30	1:89	1:89
30	Rasio guru PNS terhadap murid SD/MI	Rasio		1:23	1:28	1:29
31	Rasio guru PNS terhadap murid SMP/MTs	Rasio		1:21	1:22	1:24
32	Rasio guru PNS terhadap murid per kelas rata-rata					
33	PAUD	Rasio		1:2,6	1:6	1:7
34	SD/MI	Rasio		1:1	1:1,3	1:1,6
35	SMP/MTs	Rasio		1:1,4	1:0,7	1:0,7
36	Persentase guru PAUD yang memiliki kualifikasi S.1 / D.IV	%		40,00	32,30	37,50
37	Persentase guru SD yang memiliki kualifikasi S.1 / D.IV	%		86,00	93,41	95,31
38	Persentase guru SMP yang memiliki kualifikasi S.1 / D.IV	%		93,00	96,90	98,80

No	Indikator Kinerja	Satuan	2018	2019	2020	2021
39	Persentase guru PAUD yang bersertifikasi	%		20,00	32,40	35,70
40	Persentase guru SD yang bersertifikasi	%		67,00	80,10	80,20
41	Persentase guru SMP yang bersertifikasi	%		80,00	79,10	79,10
42	Persentase guru yang memiliki indek kinerja minimal baik	%		86,00	79,70	79,70
43	Indek integritas dan penumbhan budi pekerti peserta didik	%		65,00	73,24	73,24
44	Persentase PAUD yang terakreditasi minimal baik	%		20,00	39,00	45,00
45	Persentase SD yang terakreditasi minimal baik	%		65,00	70,00	90,00
46	Persentase SMP yang terakreditasi minimal baik	%		70,00	73,60	75,00
47	Persentase LKP yang terakreditasi minimal baik	%		0	0	0
48	Persentase PKBM yang terakreditasi minimal baik	%		20,00	20,00	20,00
49	Kemitraan dalam pengelolaan pendidikan	Dokumen		1	1	1

2. Akumulasi Kinerja Tahun 2021 terhadap Target Renstra 2016 – 2021.

Tabel 13

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai Renstra (selama 5 tahun)	Akumulasi Kinerja s.d tahun 2021	% Capaian
	Angka rata-rata lama sekolah	8,00	8,00	100,00
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	75,00	87,4	116,50
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	100,00	103,30	103,30
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	98,00	88,40	90,00
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100,00	100,27	100,23
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,00	86,80	91,00
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,80	12,90	100,70
	Rasio Guru PNS dengan Siswa :			
	PAUD	1:72	1:89	- 40,00
	SD	1:20	1:28	- 20,00
	SMP	1:20	1:21	- 10,00
	Tingkat Kelulusan			
	Angka Kelulusan SD	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai Renstra (selama 5 tahun)	Akumulasi Kinerja s.d tahun 2021	% Capaian
	Angka Kelulusan SMP	100,00	100,00	100,00
	Lembaga PAUD Negeri	12	9	75,00
	Peran dan fungsi pemangku lembaga adat	80	68	85,00
	Dokumentasi warisan budaya	90	76	84,00

3. Analisa Pencapaian kinerja

Secara umum pencapaian target indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dapat dikatakan telah mencapai target. Dari 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021 keberhasilan dan kegagalan proses pencapaian target dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Indikator Kinerja 1 : Capaian angka kelulusan 2021 masih tetap 100% untuk SD dan SMP.
- b. Indikator Kinerja 2 : Meningkatnya angka partisipasi sekolah PAUD, keberadaan lembaga PAUD Negeri berdampak terhadap semakin meningkatnya kuantitas pelayanan PAUD serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya arti pendidikan.
- c. Indikator Kinerja 3 : Meningkatnya peran dan fungsi pemangku lembaga adat.

Bidang Kebudayaan merupakan bidang yang baru tahun 2017 dimerger ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Telah berupaya merangkul seluruh pemangku adat yang ada di Kabupaten Pasaman untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi dalam rangka penyatuan persepsi dan peningkatan perilaku terhadap keutuhan adat dan budaya di Kabupaten Pasaman.

- d. Indikator Kinerja 4 : Meningkatnya dokumentasi warisan budaya.

Banyak dan beragamnya warisan budaya yang tersebar di Kabupaten Pasaman membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Pasaman melalui kegiatan revitalisasi dan pengkajian keberadaan warisan budaya baik benda dan non benda telah berupaya secara berkesinambungan untuk menghimpun semua warisan budaya yang ada di Kabupaten Pasaman.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman mengedepankan efektifitas, efisiensi dan skala prioritas dari sumber daya yang ada. Disamping itu adanya rasionalisasi kegiatan dan anggaran 2021 menyebabkan beberapa kegiatan yang telah direncanakan semula mengalami perubahan bahkan ada yang dihapuskan sesuai dengan anggaran yang ada. Hal ini dapat terlihat dari beberapa kegiatan yang harus mengalami perubahan dan penyesuaian sesuai kebutuhan dan prioritas kegiatan disamping menghindari akibat negatif. Pengurangan nilai anggaran dari perencanaan semula menunjukkan konsistensi pengefektifan sumber daya yang ada dan tersedia.

5. Analisis Program / Kegiatan Penunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk dapat terlaksananya program ini dibuat 5 kegiatan meliputi :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dianggarkan dana sebesar Rp. 4.365.000, dengan realisasi sebesar Rp. 4.365.000, persentase realisasi anggaran 100,00% dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan sebagai berikut :
 - a) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dianggarkan dana sebesar Rp. 280.443.026.244, dengan realisasi sebesar Rp. 258.799.949.003, persentase realisasi anggaran 92,28% dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan sebagai berikut :
 - a) Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Tersedianya dana Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dianggarkan dana sebesar Rp. 349.568.120, dengan realisasi sebesar Rp. 333.346.250, persentase

realisasi anggaran 95,36% dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan sebagai berikut :

- a) Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Tersedianya Bahan Logistik Kantor
 - c) Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
 - d) Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e) Terfasilitasinya Kunjungan Tamu
 - f) Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dianggarkan dana sebesar Rp. 10.110.760.000, dengan realisasi sebesar Rp. 10.015.429.213, persentase realisasi anggaran 99,06% dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan sebagai berikut :
- a) Terlaksananya pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Terlaksananya pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dianggarkan dana sebesar Rp. 172.600.000, dengan realisasi sebesar Rp. 145.808.500, persentase realisasi anggaran 84,48% dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan sebagai berikut :
- a) Tersedianya dana untuk pembayaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Tersedianya dana untuk pembayaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Pengelolaan Pendidikan

Untuk dapat terlaksananya program ini dibuat 4 kegiatan meliputi :

- 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, dianggarkan dana sebesar Rp. 43.779.689.671, dengan realisasi sebesar Rp. 43.132.596.749, persentase realisasi anggaran 98,52% dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan sebagai berikut :

- a) Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - b) Terlaksananya Pengadaan Mebel Sekolah
 - c) Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
 - d) Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - e) Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dianggarkan dana sebesar Rp. 16.425.891.750, dengan realisasi sebesar Rp. 15.749.232.900, persentase realisasi anggaran 95,88% dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan sebagai berikut :
- a) Terlaksananya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - b) Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 - c) Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - d) Terlaksananya Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dianggarkan dana sebesar Rp. 6.187.860.250, dengan realisasi sebesar Rp. 5.919.902.580, persentase realisasi anggaran 95,67% dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan sebagai berikut :
- a) Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - b) Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik PAUD
 - c) Terlaksananya Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dianggarkan dana sebesar Rp. 2.777.356.560, dengan realisasi sebesar Rp. 2.260.414.350, persentase realisasi anggaran 81,39% dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan sebagai berikut :
- a) Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
 - b) Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Untuk dapat terlaksananya program ini dibuat 1 kegiatan meliputi :

- 1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, dianggarkan dana sebesar Rp. 30.021.250, dengan realisasi sebesar Rp. 29.515.550, persentase realisasi anggaran 98,32% dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan sebagai berikut:
 - a) Terlaksananya Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

d. Program Pengembangan Kebudayaan

Untuk dapat terlaksananya program ini dibuat 2 kegiatan meliputi :

- 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dianggarkan dana sebesar Rp. 360.000.000, dengan realisasi sebesar Rp. 35.9780.315, persentase realisasi anggaran 99,94% dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan sebagai berikut :
 - a) Terlaksananya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- 2) Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dianggarkan dana sebesar Rp. 18.458.400, dengan realisasi sebesar Rp. 17.408.950, persentase realisasi anggaran 94,31% dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan sebagai berikut :
 - a) Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat

e. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Untuk dapat terlaksananya program ini dibuat 1 kegiatan meliputi :

- 1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, dianggarkan dana sebesar Rp. 14.064.350, dengan realisasi sebesar Rp. 13.713.850, persentase realisasi anggaran 97,51% dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penetapan Cagar Budaya

f. Program Pengelolaan Permuseuman

Untuk dapat terlaksananya program ini dibuat 1 kegiatan meliputi :

- 1) Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota, dianggarkan dana sebesar Rp. 617.201.700, dengan realisasi sebesar Rp. 495.437.996, persentase realisasi anggaran 80,27% dan realisasi fisik 100%, adapun output kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu
 - b) Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
 - c) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

B. Realisasi Anggaran

Tabel 15

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	Pendidikan			
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,365,000	4,365,000	100.00
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	280,114,170,644	258,495,405,203	92.28
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	328,855,600	304,543,800	92.61
3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,475,000	7,475,000	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	82,431,000	82,431,000	100.00
	Penyediaan Barang Cetak	117,672,120	117,671,900	100.00

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	dan Penggandaan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,600,000	3,590,000	99.72
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000	5,000,000	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133,390,000	117,178,350	87.85
4	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72,000,000	37,498,791	52.08
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10,038,760,000	9,977,930,422	99.39
5	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152,600,000	125,808,500	82.44
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,000,000	20,000,000	100.00
B	<i>Program Pengelolaan Pendidikan</i>			
6	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</i>			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9,717,898,792	9,078,159,000	93.42
	Pengadaan Mebel Sekolah	499,966,000	498,600,000	99.73
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	33,484,828,149	33,484,828,149	100.00
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	68,346,730	62,715,100	91.76
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	8,650,000	8,294,500	95.89
7	<i>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4,778,472,500	4,116,055,500	86.14
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	11,587,057,000	11,587,057,000	100.00
	Penyelenggaraan Proses	55,725,250	41,483,400	74.44

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4,637,000	4,637,000	100.00
8	<i>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	381,960,000	300,327,980	78.63
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	5,788,197,750	5,602,169,350	96.79
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	17,702,500	17,405,250	98.32
9	<i>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	2,753,700,560	2,239,143,850	81.31
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	23,656,000	21,270,500	89.92
C	<i>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</i>			
10	<i>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>			
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30,021,250	29,515,550	98.32
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	Kebudayaan			
D	<i>Program Pengembangan Kebudayaan</i>			
11	<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	360,000,000	359,780,315	99.94

No	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
12	<i>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	18,458,400	17,408,950	94.31
E	<i>Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</i>			
13	<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>			
	Penetapan Cagar Budaya	14,064,350	13,713,850	97.51
F	<i>Program Pengelolaan Permuseuman</i>			
14	<i>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</i>			
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	186,795,950	158,818,777	85.02
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	352,903,250	281,619,219	79.80
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	77,502,500	55,000,000	70.97

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman menetapkan sebanyak 6 (enam) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai.

Tahun Anggaran 2021 untuk mencapai 6 (enam) sasaran tersebut di atas yang dilaksanakan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman dengan melibatkan 4 (empat) bidang teknis dan 1 (satu) sekretariat dengan anggaran belanja sebesar Rp. 361.290.863.295,00 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 337.276.901.206,00 persentase realisasi keuangan sebesar 93,35% dan penyelesaian fisik sebesar 99,71% naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman ini diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stake holders ataupun pihak lain yang mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pasaman.

Labuk Sikaping, 10 Januari 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasaman


SUKARDI, S. Pd. M. M.
NIP. 19700507 199303 1 004